

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sampah tidak lepas dari adanya aktivitas manusia di berbagai sektor. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.¹ Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga banyak yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik yang mengakibatkan timbulnya pencemaran. Sampai saat ini permasalahan sampah belum ditangani dengan baik.

Semakin bertambahnya penduduk Indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau yang sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah, serta menghambat aliran air.²

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, berdampak buruk pula bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Kebersihan sebagai lembaga pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Kebersihan, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>, diakses tanggal 29 Agustus 2014

² <http://bioaryanti.wordpress.com/dampak-sampah/>, diakses tanggal 29 Agustus 2014

mengelola sampah. Perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.³

Kegiatan pembangunan yang semakin tahun semakin meningkat tentu tidak lepas dari resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Timbulnya dampak terhadap lingkungan hidup mendorong untuk makin diperlukannya upaya untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian dan pengelolaan sampah, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan penambahan

³ Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

penduduk yang meningkat setiap tahun, dan Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota berpengaruh di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu juga merupakan daerah yang relatif maju karena terletak di posisi yang strategis. Sebagai salah satu kota berpengaruh, penataan kota Sampit harus didukung dengan lingkungan yang bersih dan sehat terutama dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu pengendalian pencemaran lingkungan.

Sebagai bentuk keberhasilan dalam mengelola lingkungan perkotaan maka diberikan sebuah Penghargaan Piala Adipura kepada kota yang lingkungannya bersih dan sehat, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.⁴ Salah satu kriteria penilaiannya yaitu pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, yang menjadi indikator utama penilaian adalah bagaimana suatu daerah mengelola sampahnya dan harus ada bank sampah serta pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁵

Sampit telah mendapatkan Piala Adipura selama tiga tahun berturut-turut yakni pada tahun 2012, 2013, dan 2014.⁶ Piala Adipura menjadi lambang atau penghargaan bagi masyarakat Kotawaringin Timur dalam menjaga kebersihan lingkungan.⁷ Namun pemberian Piala Adipura tersebut menimbulkan pro-kontra, karena masyarakat beranggapan bahwa penanganan sampah di kota Sampit masih lemah, hal ini terbukti masih terdapat sampah

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>, diakses tanggal 26 agustus 2014

⁵ <http://metro.sindonews.com/read/725935/31/kriteria-penilaian-adipura-diperketat> diakses tanggal, 26 Agustus 2014

⁶ <http://www.merdeka.com/peristiwa/untuk-ketiga-kalinya-sampit-raih-adipura.html>, diakses tanggal 26 Agustus 2014

⁷ *Ibid.*

berserakan dimana-mana, sehingga masih belum layak untuk mendapatkan Piala Adipura.

Salah satu faktor penghambat dalam penanganan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan mengelola sampah. Banyak pula masyarakat yang enggan membuangnya ke tempat sampah, tetapi justru membuangnya ke sungai atau di pinggir jalan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada baku mutu air, karena air sungai menjadi sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam distribusi air bersih di kota Sampit. Selain itu, kebiasaan membuang sampah ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air sehingga apabila hujan akan terjadi banjir, maka diperlukan penataan ulang drainase dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Perda Kotim) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Pemerintah Daerah wajib mengadakan sarana dan prasana kebersihan lingkungan berupa tempat sampah, tempat penampungan sementara dan tempat pembuangan akhir, saluran-saluran, pengangkutan sampah, dan petugas kebersihan serta peralatan kerjanya. Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tempat sampah, baik dalam bentuk tong sampah maupun bak sampah kontainer, masih kurang. Dengan adanya tong sampah di tempat-tempat umum, dan bak sampah kontainer di pasar-pasar, sangat penting dalam mempermudah penataan sampah. Selain itu, armada pengangkutan sampah dan petugas kebersihan masih kurang sehingga banyak

ditemukan penumpukan sampah. Untuk satu unit armada hanya mengangkut hingga 15 TPS, akibatnya sebagian sampah tidak terangkut karena banyaknya sampah pada setiap TPS.⁸

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) serta mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan, juga memerlukan peran masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sampah.

Meskipun sudah ada Dinas yang menangani sampah, namun tindakan pengawasan yang dilakukan masih kurang, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan terhadap kawasan Sungai Mentaya yang seringkali menjadi tempat warga masyarakat untuk membuang sampah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai.⁹ Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, seperti membuangnya ke pinggir jalan, tanah kosong, bahkan sungai, meskipun sudah ada papan yang bertuliskan “*Dilarang Membuang Sampah Disini*”, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

⁸ <http://www.borneonews.co.id/index.php/kalteng/kotawaringin/timur/item/4480-penanganan-sampah-di-sampit-buruk>, diakses tanggal 26 agustus 2014

⁹ <http://www.radarsampit.net/berita-sms-pembaca-radar-sampit-25-agustus-14.html>, Keluhan masyarakat, Radar Sampit Online, diakses tanggal 28 Agustus 2014

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah, yakni;

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai bahan masukan untuk membuat suatu Peraturan Daerah guna meningkatkan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penanganan dan pengelolaan kebersihan khususnya dalam hal sampah.
- c. Masyarakat, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai hukum lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur” merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Adapun penulisan hukum atau skripsi yang mirip dengan yang dikaji oleh penulis antara lain :

1. Judul Skripsi: Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta

a. Identitas Penulis:

Nama : Farid Faizal Ali

NPM : 7500

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan
Lingkungan Hidup

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kali code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.
- 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

- 1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Masyarakat sudah memanfaatkan sampah dan barang-barang bekas yang diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan dan kompos. Masyarakat juga menggunakan teknik biopori sebagai alternatif dalam mengatasi

permasalahan sampah, banjir, dan agar dapat memiliki sumber air bersih.

2) Kendala dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta selain ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya, juga dikarenakan:

- a) Adanya keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam hal pengelolaan sampah.
- b) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata.
- c) Ketidaktegasan dalam penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata.
- d) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

2. Judul Skripsi: Pengelolaan Sampah Pasar Untuk Mencegah Pencemaran Di Kabupaten Cilacap

a. Identitas Penulis:

Nama : Yuliana

NPM : 05 05 08955

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Lingkungan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Cilacap untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan sampah pasar sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif yaitu berupa pencemaran dan merusak lingkungan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap dalam kewajiban pengelolaan sampah pasar di Kabupaten Cilacap.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengelolaan sampah pasar belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum optimal karena belum maksimalnya kinerja dari unit paguyuban pengumpul sampah, kepala pasar, Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan asri.
- 2) Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap yang mengakibatkan kerja Dinas tidak maksimal, diantaranya kendala mengenai kurangnya fasilitas-fasilitas kebersihan, kurang ada koordinasi yang baik antara kepala-kepala pasar dengan petugas dari Dinas Cipta Karya

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

3. Judul Skripsi: Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)¹⁰

a. Identitas Penulis:

Nama : Nadya Nur Annisa

Tahun : 2009

Program Studi : Ilmu Administarsi

Program Kekhususan : Admnistrasi Negara

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis reformasi pada struktur organisasi dan SDM, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat.

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan antara Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan dilakukan pemerintah Kota

¹⁰ <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/30203?mode=full>, Nadya Nur Annisa, *Pengelolaan Sampah di Kota Malang*, diakses tanggal 30 Agustus 2014

Malang untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi dinas tersebut agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam memberi pelayanan kebersihan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah. Upaya-upaya yang dilakukan DKP Kota Malang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari manajemen pembangunan yang meliputi: (1) perencanaan yang dimulai dari sistem pewadahan dan pengumpulan sampah, sistem pemindahan dan pengangkutan sampah, sistem pembuangan akhir dan sistem pengolahan sampah. Bidang Pengelolaan Kebersihan telah membuat perencanaan pengelolaan sampah baru yang disesuaikan dengan keadaan sampah saat ini, tetapi perencanaan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana, (2) pengerahan sumber daya dilakukan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan mengikutsertakan para pegawainya dalam diklat-diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari para pegawainya dalam melaksanakan

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga hasil penelitian tersebut di atas dalam hal titik fokus permasalahan yang diteliti. Skripsi pertama berfokus pada permasalahan mengenai peran serta masyarakat. Skripsi kedua berfokus pada permasalahan mengenai pengelolaan sampah pasar. Skripsi ketiga berfokus pada permasalahan mengenai upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mengelola sampah di Kota Malang. Sedangkan penulis, fokus permasalahan yang akan diteliti mengenai peran Dinas Perumahan Tata

Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pengelolaan Sampah.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Perumahan Tatakota dan Kebersihan

Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan, Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sampah

Pengertian Sampah menurut Pasal 1 angka 1 UU PPLH, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. Pengendalian

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU PPLH, Pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

5. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH, Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial sebagai data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu Bapak H. Suparman selaku Kepala Seksi Kebersihan Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Moch. Junaidi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Paulus Segah selaku Kepala Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3
- g) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas

Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan, Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 41

h) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup, Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 48

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang meliputi buku-buku dan internet yang berkaitan dengan Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah.

3) Bahan Hukum Tersier, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada responden berkaitan dengan Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka.
- b. Studi Kepustakaan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku dan internet berkaitan dengan Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bapak H. Suparman selaku Kepala Seksi Kebersihan Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Bapak Moch. Junaidi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Bapak Paulus Segah selaku Kepala Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris digunakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹¹ Berdasarkan analisis tersebut untuk menarik kesimpulan hasil penelitian digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit yang kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 150

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 42